





Kalbar Komitmen Akuntabel dan Transparan

dikelola secara akuntabel dan transparan, bebas dari penyelewengan maupun penyalagunaan.

Pengelolaan keuangan negara harus mengikuti ketentuan serta menghasilkan output. Memberikan manfaat bagi masyarakat dalam pembangunan. "Keuangan harus dikelola orang-orang yang berkompeten, profesional disertai dengan pedoman yang jelas, sesuai dengan azas-azas tata kelola dengan baik," ungkap Gubernur Drs. Cornelis, MH usai mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/9).

Rakernas dibuka Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi). Dihadiri kepala daerah seluruh Indonesia dan pimpinan kementerian/lembaga. Tampak Menteri Kabinet Kerja, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menkes Nila Moeloek, Menhan Ryamizard Ryacudu, Menristek Dikti M Nasir, Wamenkeu Mardiasmo, Mendag Enggartiaso Lukita dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Gubernur Cornelis mengatakan, Pemprov Kalbar telah beberapa kali menerima penghargaan wajat tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. Membuktikan Pemprov betul-betul dapat melaksanakan serta mengelola keuangan negara dengan baik, sesuai prosedur aturan, sekaligus membuat laporan ke pemerintah pusat.

"Dan Pemerintah Pprovinsi Kalbar tetap berkomitmen melakukan dan melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan," jelas Cornelis.

Dia mengatakan, sistem akuntansi keuangan pemerin-

tah daerah dapat digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan kemampuan pengendalian keuangan yang baik. "Makanya tujuan tercapai sesuai harapan," ujarnya.

Presiden Joko Widodo pada kesempatan itu menekankan pada simplifikasi pembuatan laporan. Sehingga hasil kerja lebih terlihat ketimbang hanya laporannya saja. "Berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur," kata Jokowi.

Ketua Umum Penyelenggara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017, Firmansyah mengatakan, Rakernas bertujuan meningkatkan komitmen Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Membangun kesadaran bahwa tujuan pengelolaan keuangan negara yang transparan adalah mewujudkan Indonesia sejahtera dan berkeadilan.

"Hal-hal teknis akan dibiarkan. Kami ingin Rakernas ini menjadi Rakernas untuk kesejahteraan masyarakat. Kami ingin akuntabilitas dan transparansi setiap pengelolaan keuangan negara," kata Firmansyah.

Dia menjelaskan, poin-poin yang akan dibahas dalam Rakernas, menyoroti bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. "Kami mendorong komitmen agar pengeluaran negara transparan. Kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan, karena melalui infrastruktur yang baik juga menjadi acuan warga untuk sejahtera," jelasnya.

Laporan: Rizka Nanda
Editor: Hamka Saptano